

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur pulau Jawa. Ibu kota provinsi ini adalah Surabaya, yang juga merupakan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Jawa Timur memiliki beragam potensi ekonomi dan kekayaan budaya, serta merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi ini memiliki banyak tempat wisata, industri dan sumber daya alam yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena kontribusi sektor industri, pertanian, dan perdagangan yang besar. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah daerah dan pelaku industri untuk memahami dan mengkaji dampak penetapan upah minimum kabupaten/kota.

Upah minimum adalah standar minimum berupa uang yang digunakan pengusaha untuk membayar pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gaji guna memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Upah buruh harus dinaikkan agar kualitas hidup buruh dan keluarganya juga meningkat. Upah dapat diberikan berdasarkan jam kerja atau satuan barang yang dapat diproduksi oleh pekerja. Upah minimum adalah suatu bentuk upaya untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rendah. Jadi, jika upah minimum tertentu semakin tinggi maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, sehingga tingkat manfaat juga akan meningkat (Ramdhansya & Indrawati, 2022).

Besaran upah minimum di Kabupaten/Kota dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan ekonomi daerah, yang ditetapkan oleh Gubernur dan diusulkan oleh Bupati atau Walikota. Secara keseluruhan, upah memiliki peran penting bagi pekerja, menjadi pendapatan yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga, serta berfungsi sebagai insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja (Lestari *et al.*, 2022).

Pemberian imbalan kepada pekerja sebagai hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan selalu menghadapi tantangan dalam proses penetapan upah minimum setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dalam menentukan besaran upah minimum, yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, dianggap belum mencukupi untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Ketidaksetaraan standar kehidupan yang berbeda-beda antar daerah juga turut berperan dalam hal ini. Hubungan antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja dapat tercermin melalui besaran upah yang diterima oleh pekerja. Sudah seharusnya pekerja diperlakukan sebagai individu yang berhak mendapatkan penghargaan yang pantas dan perlindungan. Oleh karena itu, upah minimum seharusnya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, walaupun dalam tingkat sederhana, sehingga dapat memberikan perlindungan dan penghargaan yang adil kepada pekerja (Abduh, 2022).

Timur umumnya memiliki biaya hidup yang lebih tinggi daripada Kabupaten Sampang yang termasuk wilayah dengan tingkat pengembangan ekonomi yang lebih rendah. Akibatnya, UMK di Kota Surabaya cenderung lebih tinggi untuk mencerminkan biaya hidup yang lebih tinggi.

Selain faktor perbedaan tingkat hidup dan biaya hidup, adapula faktor pertumbuhan Ekonomi dan stuktur industri yang dimana Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan beragam sektor industri. Tidak hanya Kota Surabaya tetapi pada Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto yang merupakan daerah industri yang memiliki pabrik terkenal yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang berada di Kabupaten Gresik dan PT. Ajinomoto Indonesia yang berada di Kabupaten Mojokerto. Sementara pada Kabupaten Sampang yang berada di Pulau Madura yang sektor ekonomi utama hanya sektor pertanian sehingga menjadi alasan mengapa penetapan UMK pada Kabupaten tersebut cenderung rendah.

Kesenjangan UMK antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Sampang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pengenalan kebijakan yang tepat untuk mengatasi perbedaan ini menjadi penting guna mencapai keseimbangan dan keadilan dalam tingkat upah antar wilayah.

Dalam ranah ketenagakerjaan, upah merupakan isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan, dan hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek

ekonomi. Berbagai dimensi ketenagakerjaan selalu memiliki keterhubungan dengan upah. Upah mengacu pada segala bentuk kompensasi yang timbul dari perjanjian kerja, independen dari jenis pekerjaan dan bentuk mata uang yang digunakan. Upah mencerminkan pendapatan yang diterima oleh pekerja sebagai balasan atas kontribusi kerjanya. Pembayaran upah dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai maupun non tunai (Damanik & Zalukhu, 2021).

Permasalahan upah minimum adalah permasalahan yang tiada habisnya di dunia ketenagakerjaan. Terdapat perbedaan pandangan serta kepentingan, tenaga kerja menjadikan upah sebagai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penetapan upah dengan ketentuan tidak sesuai standar kebutuhan layak hidup maka akan mengakibatkan hasil kerja tidak maksimal sehingga produktivitas perusahaan rendah dan permintaan jumlah produksi tidak dapat tercapai sesuai target perusahaan. Sedangkan perusahaan memiliki kepentingan terhadap upah untuk mengefisiensi biaya agar mendapatkan profit ataupun memaksimalkan laba, upah yang semakin besar diberikan kepada pekerja atau buruh mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan profit atau laba yang maksimal.

Terdapat berbagai jenis barang dan jasa dalam konteks ekonomi, dan ketika produktivitas tenaga kerja meningkat, hasil produksi barang dan jasa akan bertambah dan waktu yang diperlukan untuk produksi akan lebih singkat. Harga barang dan jasa biasanya mengalami variasi atau kenaikan setiap tahunnya. Perbedaan ini mempengaruhi harga barang dan jasa, yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan, yang kemudian berdampak beragam pada

kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, muncul tantangan dalam mengidentifikasi perubahan harga yang terjadi dalam tingkat perekonomian, sehingga perhitungan nilai upah riil dari tahun ke tahun menjadi kompleks (Primadila & Asmara, 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan situasi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tiap tahun, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di berbagai daerah di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu contoh di Indonesia yang menunjukkan peningkatan nilai UMK setiap tahunnya. Produk domestik daerah mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi di dalam wilayah, tanpa memperhatikan asal-usul atau kepemilikan faktor produksi dari penduduk setempat. Penghitungan produk domestik ini sering disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang disebut "domestik" karena fokus pada batas wilayah tertentu dan "bruto" karena telah memperhitungkan depresiasi aset dalam perhitungannya (Permadi & Chrystanto, 2021). Berikut merupakan data PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022:

Kabupaten/Kota yang menjadi pusat pemerintahan di Jawa Timur, seperti Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota terbesar dan pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Kota ini memiliki pelabuhan laut yang strategis, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, yang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Keberadaan pelabuhan ini memfasilitasi arus barang dan jasa yang signifikan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Sementara Kota Mojokerto memiliki nilai PDRB terendah didominasi oleh sektor-sektor ekonomi tertentu yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat atau kurang berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB.

Jika sektor-sektor ekonomi yang dominan mengalami masalah atau tidak berkembang, hal ini dapat berdampak negatif pada PDRB. Kota Mojokerto memiliki sumber daya alam yang terbatas atau tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan sumber daya alam dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pada penelitian Damanik & Zalukhu (2021) membuktikan dengan hasil PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum pada penelitiannya.

Selain indikator PDRB, Pengeluaran per kapita juga menjadi faktor yang mempengaruhi upah minimum. Pengeluaran per kapita adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung rata-rata pengeluaran per individu dalam suatu populasi atau daerah tertentu dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran per kapita dapat dihitung untuk berbagai aspek, termasuk pengeluaran makanan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan lainnya. Pengeluaran per kapita menunjukkan rata-rata pengeluaran per individu di suatu wilayah. Jika upah

minimum di Kabupaten/Kota Jawa Timur relatif rendah, maka pengeluaran per kapita cenderung akan terpengaruh, karena pendapatan individu menjadi terbatas. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, sehingga dampaknya dapat dirasakan pada konsumsi barang dan jasa.

Upah minimum yang tinggi dapat meningkatkan pengeluaran per kapita dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pengeluaran per kapita juga bergantung pada tingkat inflasi dan harga barang dan jasa di daerah tersebut. Tingkat upah minimum yang berpengaruh pada pengeluaran per kapita juga berkaitan dengan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jika upah minimumnya rendah dan kesenjangan pendapatan tinggi, maka pengeluaran per kapita dapat mengalami variasi yang signifikan antara satu penduduk dengan penduduk lainnya.

Potensi ekonomi dan lapangan kerja di wilayah tersebut juga mempengaruhi tingkat pengeluaran per kapita. Jika Kabupaten/Kota Jawa Timur memiliki sektor ekonomi yang kuat dan banyak peluang kerja, maka pengeluaran per kapita dapat meningkat. Pengeluaran per kapita yang stabil atau meningkat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu pendorong utama ekonomi. Pada penelitian Yunita & Sirait (2020) membuktikan bahwa Pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota. Berikut data Pengeluaran per kapita dari seluruh Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2022:



Sumber: BPS, Data diolah

Gambar 1.3 Grafik Pengeluaran Perkapita 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Berdasarkan grafik 1.3 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Surabaya mencapai Rp.18.345.000,00 juga di Kota Malang sebesar Rp.16.897.000,00 dan di Kota Madiun sebesar Rp.16.503.000,00 Sedangkan Pengeluaran per kapita terendah berada pada Kabupaten Sampang sebesar Rp. 8.944.000,00 juga di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.8.967.000,00 dan di Kabupaten Bangkalan sebesar Rp.8.971.000,00. Dari data diatas Kota Surabaya, Malang, dan Madiun memiliki sektor ekonomi yang lebih berkembang dan beragam, yang menciptakan lebih banyak peluang kerja dan pendapatan bagi penduduknya. Sementara itu, kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan mengandalkan sektor ekonomi yang lebih terbatas, yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena kota-kota besar biasanya memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses lebih mudah terhadap berbagai pelayanan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Hal ini dapat

mendorong peningkatan pengeluaran per kapita karena masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa. Perbedaan tingkat harga barang dan jasa antar wilayah juga dapat mempengaruhi pengeluaran per kapita. Kota-kota besar seringkali memiliki tingkat harga yang lebih tinggi daripada Kabupaten, yang dapat mengakibatkan pengeluaran per kapita yang lebih besar di kota-kota tersebut. Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting, wilayah dengan budaya yang lebih konsumtif atau lebih mementingkan gaya hidup tertentu sehingga pengeluaran per kapita yang meningkat.

Setelah PDRB dan Pengeluaran per kapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penentuan upah minimum. TPAK memiliki peran dalam mengidentifikasi ketersediaan tenaga kerja, yang mana informasi ini dapat membantu mengatur upah yang pantas bagi pekerja, karena penghitungan upah seringkali dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja. Pembatasan dalam jumlah peluang pekerjaan dapat merendahkan tingkat TPAK, sehingga permintaan untuk tenaga kerja akan meningkat. Bila permintaan tenaga kerja meningkat, kelebihan pasokan tenaga kerja ini akan terserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh ketentuan hukum, dan ini pada akhirnya akan memengaruhi tingkat upah secara negatif. Apabila pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih besar, maka nilai upah akan mengalami penurunan (Armidi *et al.*, 2018). Berikut merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

menunjukkan partisipasi aktif penduduk usia kerja dalam perekonomian wilayah tersebut.

Rendahnya tingkat TPAK di Kota Malang disebabkan oleh seperti tingginya angka pendidikan atau mobilitas tenaga kerja yang lebih rendah, sedangkan di Kabupaten Jombang Penyebabnya bervariasi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang kurang pesat atau adanya sektor ekonomi yang tidak begitu menggerakkan lapangan kerja. dan di Kabupaten Nganjuk tingkat TPAK rendah dipengaruhi oleh faktor-faktor serupa, seperti pertumbuhan ekonomi yang kurang dinamis atau keterbatasan lapangan kerja. Pada penelitian Primadila & Asmara (2022) dengan judul analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Kota Banjarmasin” dengan hasil Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penetapan Upah Minimum.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas bahwa meskipun daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sektor ekonomi dan sektor industri yang cukup banyak dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi Provinsi Jawa Timur menjadi urutan pertama jumlah penduduk miskin di Indonesia yang datanya tercatat pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 sebesar 4.236.510 jiwa sedangkan pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.858.230 jiwa yang dimana tingkat upah minimum lebih tinggi pada Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga peneliti meneliti apakah ada keterkaitan antara PDRB, Pengeluaran per kapita dan TPAK terhadap Upah Minimum. Hal inilah yang selanjutnya akan dikaji dalam

penelitian terkait pengaruh PDRB, Pengeluaran per kapita dan TPAK terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menunjukan kondisi Upah Minimum di wilayah Jawa Timur. Beberapa Kabupaten/Kota masih perlu di perhatikan lagi untuk angka besaran upah minimum dikarenakan jawa timur termasuk salah satu daerah kawasan besar yang ada di Indonesia. Sehingga Penulis ingin mengetahui seberapa pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum yang meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran per kapita dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dilihat dari definisi masalah di atas, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran per kapita terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

2. Menganalisis pengaruh Pengeluaran per kapita terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di ketahui, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian penulis mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang topik yang di teliti. Membantu penulis untuk mengembangkan ketrampilan seperti analisis data, kritis berpikir dan penulisan akademik juga meningkatkan peluang karir di masa depan.

2. Bagi Pembaca

Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, memperluas pengetahuan dan mendapatkan referensi yang menginspirasi untuk penelitian kedepan.

3. Bagi Akademis

Melalui penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi Universitas Amikom Yogyakarta, peluang publikasi dan pembelajaran selanjutnya terkhusus untuk program studi Ekonomi.

4. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian diharapkan pemerintah untuk menambahkan informasi publik sehingga mudah diakses dan digunakan untuk penelitian dan dapat membantu dalam pengembangan solusi yang berbasis bukti untuk masalah yang dihadapi pemerintah.

1.5. Sistematika Bab

Adapun didalam sistematika ini menjelaskan isi bab secara singkat guna memberikan gambaran kepada pembaca, berikut sistematika bab tertulis di bawah ini,

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab yang berisikan latar belakang yang menjelaskan permasalahan pada penelitian ini. Adapun isi uraian dari bab 1 ini yaitu meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang teori- teori yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat menjadi penguat penelitian ini. Adapun isi uraian dari bab 2 ini yaitu meliputi, landasan teori, peneliti terdahulu, kerangka pikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN merupakan bab yang berisikan metodologi penelitian yang digunakan didalam bab penelitian ini. Adapun uraian bab 3 yaitu meliputi, objek penelitian, definisi operasional variabel dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN merupakan bab yang berisikan tentang hasil pembahasan yang dimana pada bab ini menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari penelitian ini sesuai dengan judul penelitian. Adapun isi dari uraian bab 4 yaitu hasil olah data yang sekaligus berisikan inteprestasi dari olah data yang dihasilkan.

BAB V PENUTUP merupakan bab yang berisi penutup. Adapun isi dari uraian bab 5 yaitu kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini berdasarkan perolehan hasil pembahasan yang di dapatkan dan saran yang ditulis berdasarkan kesimpulan.

